



Usulkan Tamansiswa Jadi Sekolah Rakyat

Nguri-nguri Warisan Bapak Pendidikan Nasional

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengusulkan Tamansiswa menjadi Sekolah Rakyat

yang ada di Kota Yogyakarta. Ini mengingat gedung untuk fasilitas asrama dan mengajar sudah siap.

Hasto mengaku, telah mengusulkan hal tersebut ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu saat bertemu di Jakarta. Mantan Bupati Kulon Progo ini melihat banyak kesiapan dan kemanfaatan

dari kerja sama tersebut.

"Misalnya seperti filosofi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Maharsya, dan Tut Wuri Handayani. Tetapi, sekali lagi, mudah-mudahan pihak Tamansiswa nanti berkenan, karena kami juga tidak bisa memaksa," kata Hasto beberapa waktu lalu.

■ **Baca USULKAN.. Hal II**

Usulkan Tamansiswa Jadi Sekolah Rakyat

sambungan dari hal Joglo Jogja

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, pihaknya menawarkan kerja sama antara pemerintah kota

(pemkot) dengan lembaga pendidikan Tamansiswa.

"Mudah-mudahan saja bisa teralisasi bagaimana kami membranding sekolah rakyat itu dengan kerja

sama antara pemerintah dan dengan Tamansiswa," ujar Budi.

Di DIY, Sekolah Rakyat (SR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mulai. Dinas

Sosial (Dinsos) DIY yang akan menyelenggarakan di daerah.

Kepala Dinsos DIY Endang Patmintersih menjelaskan, penerimaan siswa SR tahun ajaran 2025/2026 ini dibuka untuk jenjang SMA. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 hingga 30 April 2025 mendatang.

"(Pendaftaran) sampai 30 April, karena Mei sudah persiapan untuk semuanya karena 1 Juli sudah masuk (sekolah)," ujar Endang.

Dinsos DIY, kata Endang, telah menyiapkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) milik Kemensos di dua lokasi di DIY. Yaitu, di Purwomartani, Kali-

saran, Sleman, dan Sonosewu, Ngestiharjo, Bantul.

"Membangun itu kan pusat butuh waktu. Sementara per 1 Juli harus jalan, maka Kemensos ini punya bangunan yang baik yang ready. Kemensos punya balai besar yang ada di Sonosewu dan di Purwomartani," paparnya.

Ia menjelaskan, untuk kedua SR itu untuk jenjang SMA. Dengan daya tampung berbeda. Untuk di Sonosewu untuk seratus siswa dan Purwomartani untuk lima puluh siswa.

Untuk persyaratan utama siswa harus masuk dalam kategori miskin yang dibuktikan dengan telah terdaftar di Data Ter-

padu Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN).

"Nanti akan dibuktikan dengan pemadatan data, (pengecekan) benar nggak sih masuk DTSEN, data kemiskinan. Dan seleksinya punya semangat nggak untuk masuk SR ini," papar Endang.

Ia menegaskan, bagi yang memang benar-benar dari keluarga miskin tapi tak masuk DTSEN, pihaknya akan tetap memproses. Nantinya ada proses berbeda yang masuk DTSEN dengan yang belum.

"Kalau miskin tapi belum masuk DTSEN, kan ini yang perlu juga diproses. Kalau benar-benar miskin, terlewat, tidak

masuk DTSEN ini yang perlu kita proses," tambahnya.

Endang menegaskan, SR tidak ditarik biaya sepeserpun termasuk biaya asrama. Sedangkan untuk pengajar juga disiapkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"(Pengadaan pengajar) dari pusat, Kemendikdasmen kan juga sudah menyiapkan, bergerak, menyiapkan bersama kabupaten/kota. Dan, banyak guru-guru, kepek yang belum masuk formasi misalnya, itu akan diseleksi, bisa yang PPPK, yang belum PPPK bisa, PNS bisa," katanya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005